



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV MELALUI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

Rizki Pratama¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV melalui Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cianjur Tahun 2023”. Masalah dari penelitian ini belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, permasalahan yang terjadi seperti orang yang sudah terinfeksi HIV tidak semuanya menjalankan pengobatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahayanya HIV. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga informan yang dipilih merupakan pihak pemangku kepentingan dengan menyesuaikan pada judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan berdasarkan dimensi tujuan: sudah berpedoman kepada peraturan yang ada, dimensi lingkungan: telah melakukan upaya pencegahan, pengobatan, dan juga perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimensi pengarah: pemeriksaan HIV yang sesuai dengan kelompok sasaran masih jauh dari target yang ada, dimensi pembelajaran: sosialisasi yang masih belum maksimal karena anggaran yang kurang memadai serta petugas yang koordinasi antar lembaga itu berjalan dengan baik, dimensi aksi: capaian selalu berganti dalam menangani kasus HIV.

Kata Kunci: Strategi, Pelayanan Kesehatan, Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Abstract

This research is entitled "Local Government Strategies in Improving the Quality of Health Services for People at Risk of HIV Infection through the AIDS Commission in Cianjur Regency in 2023". The problem of this research

is that the quality of health services for people at risk of HIV infection by the Cianjur District AIDS Commission and the Cianjur District Health Office is not optimal, problems that occur such as people who have been infected with HIV do not all carry out treatment, lack of socialization to the public about the dangers of HIV. The research method used is a qualitative research method with a case study approach, so that the informants selected are stakeholders by adjusting to the research title. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that health services based on the goal dimension: have been guided by existing regulations, the environmental dimension: have made prevention, treatment, and care efforts in accordance with applicable regulations, the direction dimension: coordination between institutions is going well, the action dimension: the achievement of HIV testing in accordance with the target group is still far from the existing target, the learning dimension: socialization is still not optimal due to inadequate budget and officers who always change in handling HIV cases.

Keywords: Strategy, Health Services, People at Risk of HIV Infection

PENDAHULUAN

Saat ini relevansi pelayanan kesehatan terhadap hak kesehatan tersebut diuji dengan pengelolaan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang masih belum optimal. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi pengidap/penderita HIV dan AIDS harus terus dilaksanakan guna membangun pelayanan yang lebih baik, karena semakin tingginya angka orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS.

Untuk mengatasi permasalahan HIV dan AIDS yang terus berkembang pesat di Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau disingkat KPAN adalah suatu lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif,

menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi di Indonesia . Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 ini juga menguatkan fungsi sekretariat KPAN, yang tidak hanya untuk mendukung tim pelaksana KPAN, namun juga memiliki peran kunci dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi seluruh sektor terkait, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.

HIV dan AIDS tidak hanya menyerang kota-kota besar di Indonesia. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah orang dengan HIV/ AIDS terbanyak. Umumnya, di Kabupaten Cianjur ODHA yaitu lelaki dan juga anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cianjur bahwa kasus tahunan HIV di Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan kasus terhitung sejak tahun 2009. Beberapa faktor penyebabnya yaitu karena pergaulan bebas, tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat, juga wisatawan dari luar daerah yang datang setiap liburan. Dari berbagai temuan kasus di Kabupaten Cianjur, pengidap HIV didominasi oleh kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) atau homoseksual. Selain kelompok tersebut temuan kasus lain yang terbanyak yaitu Wanita Pekerja Seks dan ibu rumah tangga.

Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi- tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Adapun rumusan strategi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Strategi 1

Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan Kesehatan.

b) Strategi 2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

c) Strategi 3

Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

d) Strategi 4

Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam rencana strategi yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pada point ke-empat yaitu mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam fenomena HIV yang marak di Kabupaten Cianjur strategi ke-empat sangatlah harus diimplementasikan guna untuk menekan angka HIV yang tinggi setiap tahunnya di Kabupaten Cianjur. Karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), pasal 7 menyatakan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah dan masyarakat:

- a. mendorong untuk melaksanakan konseling dan tes HIV secara sukarela terutama bagi populasi rawan dan populasi risiko tinggi;
- b. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigma dan diskriminasi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. menjamin ketersediaan sarana penunjang diagnostik HIV, IMS dan enfraksi penyerta; dan
- d. memfasilitasi ketersediaan obat antiretroviral, obat IMS dan obat antiinfeksi penyerta.

Adapun prioritas pembangunan di Kabupaten Cianjur salah

satunya yaitu peningkatan akses layanan kesehatan. Hal ini dijelaskan pada rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2023. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV menjadi salah satu program/kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2023. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV haruslah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Dalam kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dihibahkan kepada Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Cianjur telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Tabel 1. 1. Data Kasus Terinfeksi HIV di Kabupaten Cianjur

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2019	79	100
2	2020	135	54
3	2021	71	40
4	2022	43	39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1. diatas, kasus HIV di Kabupaten Cianjur setiap tahunnya selalu ada. Diluar data diatas, diduga masih banyak orang dengan HIV AIDS baru yang tidak melakukan tes kesehatan. Persoalan lainnya yaitu terkait pengobatan orang yang sudah terinfeksi HIV. Di Kabupaten Cianjur, orang yang sudah terinfeksi HIV belum semuanya mau untuk menjalani

pengobatan, hal ini mengakibatkan beberapa yang terinfeksi HIV yang tidak berobat berujung meninggal dunia. Menurut dugaan peneliti disebabkan karena strategi yang dirancang pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi seperti tujuan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur masih belum berjalan sesuai rancangan, lingkungan yang masih belum mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, tindakan dalam menjalankan program dan juga evaluasi atau pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Alasan peneliti tertarik meneliti hal tersebut dikarenakan dalam kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV masih rendah. Seperti masih belum meratanya tes HIV khususnya kepada golongan yang rentan terinfeksi HIV, masih belum meratanya pelayanan kesehatan bagi orang yang sudah terinfeksi HIV, serta kasus HIV yang selalu menjadi polemik disetiap tahunnya.

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan teori sebagai landasan untuk menganalisis serta dapat menjawab permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Permasalahan yang di kaji ini yaitu tentang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten Cianjur. Pemerintah memerlukan strategi untuk menangani masalah tersebut agar kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat sehingga dapat menekan angka HIV di Kabupaten Cianjur. Pemerintah memerlukan strategi dalam menjalankan program meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten Cianjur agar program tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

agar tercapainya suatu tujuan dari program tersebut. Peneliti memilih teori Geoff Mulgan. Peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh Geoff Mulgan, hal ini dikarenakan secara praktis teori tersebut mudah diterjemahkan, dimengerti dan diaplikasikan sehingga teori ini dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian tentang permasalahan yang ada menjadi lebih efektif.

Seperti bagaimana keberhasilan strategi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam menjalankan program peningkatan kualitas layanan kesehatan terhadap orang dengan risiko terinfeksi HIV tersebut dapat ditinjau dari komponen-komponen strategi seperti : tujuan, pengarahannya, lingkungan, tindakan, dan pembelajaran tersebut telah berjalan dengan baik atau mungkin terdapat suatu strategi tertentu khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sendiri dalam proses pencapaiannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti menggunakan tipe penelitian ini dengan maksud untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur. Informan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV melalui Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cianjur Tahun 2023 maka informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur, Orang dengan risiko terinfeksi HIV,

Masyarakat (pendamping orang dengan HIV), Tokoh Masyarakat

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV itu sudah jelas dan sudah berpedoman kepada peraturan yang ada. Hal ini dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian, pasien HIV dipertahankan. Namun pada kenyataannya di lapangan masih terus adanya infeksi baru, kematian yang disebabkan AIDS, dan juga diskriminasi dari masyarakat. Masih kurangnya sosialisasi dalam bahayanya HIV, karena masih banyak orang yang awam terkait HIV. Hal ini perlu jadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur karena dengan sosialisasi dapat mengubah suatu keadaan terkait HIV yang ada di Kabupaten Cianjur. Lingkungan internal sangatlah berperan dalam pelaksanaan strategi pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah melakukan perannya sebagai organisasi perangkat daerah yang memang bekerja dalam teknisnya seperti halnya screening, pengobatan, dan juga perawatan. Di sisi lain Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur juga telah melaksanakan perannya sebagai organisasi independent yang memiliki peran sebagai mediasi dan juga advokasi dalam HIV/ AIDS di Kabupaten Cianjur.

Dalam proses *screening* tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah melakukannya ke berbagai kelompok sasaran sesuai dengan strategi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Namun capaian pemeriksaan HIV tahun 2023

masih jauh dari target. Adapun capaian Pemeriksaan HIV tahun 2023 berdasarkan kelompok resiko, yaitu sebagai berikut:

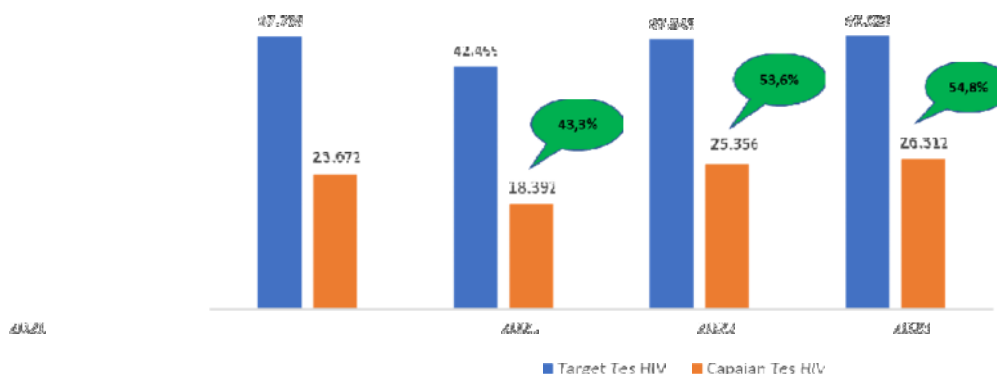
Tabel 4.1. Capaian Pemeriksaan HIV tahun 2023 berdasarkan Kelompok Resiko

No	Kelompok Sasaran	Capaian	Target	%
1	Ibu Hamil	21.848	40.749	53,6%
2	Pasien TB	2.137	3.476	61,4%
3	Pasien Infeksi Menular Seksual	43	520	8,2%
4	Lelaki Seks Lelaki	1.121	2.255	49,7%
5	Wanita Pekerja Seks	106	138	76,8%
6	Waria	160	117	136%
7	Pengguna Narkoba Suntik	172	113	152%
8	WBP	212	560	37,8%
9	Pasangan Risiko Tinggi	82	-	-
10	Pelanggan Pekerja Seks	27	-	-
11	Lainnya	447	-	-
Total		26.312	47.928	54,8%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur juga telah melakukan pemetaan untuk tiap-tiap kelompok berisiko. Namun memang sampai saat ini untuk tahap *screening* pun masih jauh dari target. Hal ini dapat dilihat dari gambar 4.7 sebagai berikut :

Gambar 4. 2. Target Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Tes HIV tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah melakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan maksimal. Namun masih ada beberapa

kendala seperti halnya petugas yang selalu berganti dalam menangani kasus HIV yang mengakibatkan dalam pendataan dan penanganan kasus HIV ini terhambat. Padahal kasus HIV ini sudah memiliki tujuan yang jelas di mana pada tahun 2030 memiliki strategi triple eliminasi untuk kasus HIV ini.

Komisi Penanggulangan AIDS juga masih kekurangan dana untuk kegiatan sosialisasi HIV. Padahal sosialisasi terkait bahaya HIV merupakan salah satu cara untuk menekan angka HIV di Kabupaten Cianjur. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Cianjur yang sangat luas. Jika dioptimalkannya sosialisasi terkait bahayanya HIV, maka masyarakat akan menjadi lebih tau dan hati-hati terkait HIV. Sosialisasi HIV juga dapat mengurangi stigma negative dan juga kasus diskriminasi kepada orang-orang yang terkena HIV

KESIMPULAN

Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Perlunya kerjasama dengan masyarakat yang lebih maksimal agar capaian pemeriksaan HIV dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur telah melakukan tindakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang bertujuan untuk menekan angka HIV di Kabupaten Cianjur. Orang yang telah terpapar HIV enggan berobat sehingga mengakibatkan dapat menularkan ke banyak orang. Sosialisasi yang masih belum maksimal karena anggaran yang kurang memadai yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Cianjur. Petugas selalu berganti dalam menangani kasus HIV yang mengakibatkan dalam pendataan dan penanganan kasus HIV ini terhambat. Padahal kasus HIV ini sudah memiliki tujuan yang jelas di mana pada tahun 2030 memiliki strategi triple eliminasi untuk kasus HIV ini. Komisi Penanggulangan AIDS juga masih

kekurangan dana untuk kegiatan sosialisasi HIV. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Cianjur yang sangat luas. Jika dioptimalkannya sosialisasi terkait bahayanya HIV, maka masyarakat akan menjadi lebih tau dan hati-hati terkait HIV. Sosialisasi HIV juga dapat mengurangi stigma negative dan juga kasus diskriminasi kepada orang-orang yang terkena HIV.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adnan, I. M. (2013). *Manajemen Strategis Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Assaf, A. (2009). *Mutu Pelayanan Kesehatan Perspektif Internasional*. Jakarta: EGC.
- Gunawan, W. (2020). *Kamus Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Bee Media Pustaka.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Moenir, H. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indoensia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, M. Q. (2007). *Manajemen Strategis Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Ratmiko, & Winarsih, A. S. (2015). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salusu, J. (2005). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Grasindo.
- Satrianegara, M. F. (2009). *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steiner, G. A., & Miner, J. B. (1998). *Kebijakan dan strategimanajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suwarsono, M. (2008). *Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*.

Bogor: GhaliaIndonesia.

Umar, H. (2001). Strategi Manajemen in Action . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wulandari, & Erawati. (2016). Buku Ajar Keperawatan Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL:

Kana, I. (2017). Human Immunodeficiency Virus and the Central Nervous System. sciencedirect, 119-123.

Rusdiananingtyas, E., Ribawanto, H., & Prasetyo, W. Y. (2014). Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka (Studi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1898-1904.

Susanti, Y. A. (2020). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2.

WEBSITE:

adminlp2m. (2022, November 30). Mengenal Unit Analisis: Pengertian, Jenis, serta Contoh. Diambil kembali dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: <https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/30/mengenal-unit-analisis-pengertian-jenis-serta-contoh/>

Agustina, N. (2022, Juli 31). Ayo Cari Tahu Apa Itu HIV. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/754/ayo-cari-tahu-apa-itu-hiv

Arifa. (2022, Desember 21). Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya. Diambil kembali dari Penelitian Ilmiah: <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>

Hafiz Surahman. (2022, Juni 23). Mengenal Dolutegravir Obat Antiretroviral Yang Menjadi Pilihan Utama Pengobatan Pasien HIV Saat Ini. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/87/mengenal-dolutegravir-obat-antiretroviral-yang-menjadi-pilihan-utama-pengobatan-pasien-hiv-saat-ini

Selamet, I. (2022, Mei 31). detik jabar berita: warga cianjur tertular hivAIDS akibat lsl. Diambil kembali dari detik jabar: <https://www.detik.com/jabar>

Spiritia. (2021, Juni 17). 9 Cara Penularan HIV dari yang Umum sampai Tak Terduga, Ketahui Cara Pencegahannya. Diambil kembali dari Spiritia Yayasan: <https://spiritia.or.id/informasi/detail/218>

PERATURAN:

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

